

**PENGARUH REGULASI KEUANGAN DAERAH, POLITIK ANGGARAN DAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP PENYERAPAN
ANGGARAN PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT**

ARTIKEL

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH:

TESSA SANJAYA

14043137/2014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
PENGARUH REGULASI KEUANGAN DAERAH, POLITIK ANGGARAN
DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN PADA OPD PROVINSI SUMATERA
BARAT

Oleh:
TESSA SANJAYA
14043137

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2018 dan telah diperiksa/ditetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 8 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Mia Angelina Sefiawan, SE, M.Si
NIP. 19880507 201404 2 001

PENGARUH REGULASI KEUANGAN DAERAH, POLITIK ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT

Tessa Sanjaya
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl.
Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: tesasanjaya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Total Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 responden disetiap OPD sehingga total kuisisioner yang disebar adalah 144 kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.00.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien β sebesar -0,014 dan nilai signifikansi $0,903 > 0,05$, (2) Politik anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien β sebesar 8,952 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien β sebesar -0,032 dan nilai signifikansi $0,664 > 0,05$.

Kata kunci: Penyerapan Anggaran, APBD, Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran, Pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

ABSTRACT

This study aims to prove empirically the influence of regional financial regulation, budget politics, and the implementation of procurement of goods / services against budget absorption. This research is classified as causative research. The population in this study is 36 Regional Device Organizations (OPD) of West Sumatra Province. The sample in this study uses the Total Sampling method. The type of data used in this study is primary data. Data collection techniques using a questionnaire consisting of 4 respondents in each OPD so that the total questionnaires distributed were 144 questionnaires. The analysis method used is Multiple Regression Analysis using SPSS version 21.00.

Based on the results of multiple regression analysis with a significance level of 5%, the results showed that (1) regional financial regulation had no significant positive effect on budget absorption with the β coefficient of -0.014 and a significance value of $0.903 > 0.05$, (2) Budget politics had a significant positive effect on the absorption of fencing with the β coefficient of 8.952 and a significance value of $0.000 < 0.05$. (3) The procurement of goods / services has no significant positive effect on budget absorption. With the β coefficient of -0.032 and a significance value of $0.664 > 0.05$.

Keywords: Budget Absorption, APBD, Regional Financial Regulation, Budget Politics, Implementation of goods / services procurement.

PENDAHULUAN

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara (Bastian, 2010).

Berdasarkan dari defenisi anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran berfungsi sebagai sebuah alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang akan dicapai oleh organisasi pemerintahan dalam kurun waktu tertentu. Adapun fungsi pengendalian yaitu mengendalikan setiap alokasi sumber dana. Dalam organisasi sektor publik sumber dana yang dimaksud yaitu sumber dana yang disahkan oleh legislatif untuk dibelanjakan atau disebut Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan sumber dana yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan agar tetap berlangsung. Dengan adanya APBD, diharapkan pemerintah daerah lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang beragam sesuai dengan preferensi masyarakat. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Namun, seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah hingga sekarang, terjadi sebuah fenomena yang menarik yaitu lambatnya penyerapan anggaran APBD pada awal tahun anggaran. Sehingga percepatan penyerapan anggaran yang masih menumpuk kerap kali dilakukan tiap menjelang akhir tahun anggaran. Bukan berita baru jika tersiar bahwa hingga menjelang akhir tahun penyerapan anggaran masih menjadi salah satu batu sandungan dalam pengelolaan keuangan negara. Padahal praktik seperti itu jelas merupakan pola penyerapan anggaran yang tidak sehat dan menunjukkan indikasi pengelolaan keuangan negara yang kurang baik (Noviwijaya, 2013).

Penyerapan anggaran yang lambat perlu

mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi ekonomi. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi lambatnya penyerapan anggaran diantaranya faktor regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, karena para pegawai daerah beradaptasi mengenai aturan-aturan yang akan dijalankan, dan kurangnya perlindungan hukum menjadikan pemda tidak bisa langsung menggunakan sumber dana yang ada.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran selanjutnya yaitu faktor politik anggaran, politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan politik. Menurut Irene S. Rubin dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Public Budgeting* (2000) mengatakan bahwa, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituenya.

Penelitian Abdullah (2010), menyatakan bahwa politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya penyerapan anggaran yang mana proses politik ini yaitu proses penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik.

Martowardojo (2011) menjelaskan, salah satu kendala utama dalam penyerapan anggaran yang lambat karena proses pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa yang tidak terkoordinasi dengan baik. Sebelumnya penelitian terhadap pengaruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran juga telah dilakukan oleh Siswanto dan Rahayu (2010) dan

Kuswoyo (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) masih berjalan lambat. sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru membelanjakan 20 persen anggaran belanja yang dialokasikan. Tercatat, masih ada 17 SKPD dengan realisasi anggaran dalam rentang 0-30 persen dan 19 SKPD dengan realisasi belanjanya baru 30-40 persen. Sementara sisanya, hanya empat SKPD yang teratat bisa merealisasikan belanja hingga 46,84 persen. Serapan anggaran yang rendah memberikan risiko bagi Sumatera Barat untuk mendapatkan "cipratan" Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih rendah. Hal ini lantaran pemerintah pusat sudah menjatuhkan ultimatum bagi seluruh pemerintah daerah untuk menggenjot serapan anggaran. Bila tak tercapai, maka pemangkasan DAU adalah ganjaran yang harus diterima (nasional.republika.co.id).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat”**.

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Sejahumana pengaruh regulasi keuangan daerah terhadap penyerapan anggaran?
2. Sejahumana pengaruh politik anggaran terhadap penyerapan anggaran?
3. Sejahumana pengaruh Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran?

KAJIAN TEORI

A. Teori Stakeholders

Teori agensi Teori *Stakeholders* adalah teori yang menjelaskan hubungan timbal balik antar pemerintah dan para *stakeholder* yang ada di dalamnya. Pemerintah sebagai *stakeholder* memiliki peran penting untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemerintah dalam proses memajukan suatu daerah. Pemerintah diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang ada untuk memajukan pembangunan secara maksimal untuk kepentingan rakyat daerahnya.

Kepentingan rakyat disini adalah bagaimana

pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi disuatu daerah menggunakan anggaran yang sudah disahkan oleh DPRD dan direpresentasikan sesuai dengan kebutuhan rakyat sehingga hasilnya akan kembali kepada rakyat. Tentu tidak mudah mewujudkannya secara instan, untuk itu pemerintah diharapkan bekerja sama dengan masyarakat dalam menggunakan kewenangannya. pelayanan, strategi dan operasi sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut menjadi tanggung jawab OPD sebagai *stakeholder* pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis sehingga penyerapan anggaran akan cepat dan merata terserap sampai akhir tahun.

B. Anggaran

Menurut Bastian (2006: 289) anggaran merupakan pernyataan tertulis berupa ukuran finansial mengenai estimasi kinerja masa depan yang hendak dicapai selama periode tertentu biasanya satu tahun. Anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja organisasi publik yang akan dicapai, dan diukur dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) anggaran pada sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dirancang oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran angka satuan uang, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktifitas.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

APBD dapat didefinisikan sebagai pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Mamesah, 1995: 20 dalam Halim, 2007: 20).

2. Struktur APBD

Dalam UU 17 tahun 2003, PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan

Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

D. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahap dari siklus anggaran, yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Tahapan penyerapan anggaran akan dimulai ketika Undang-Undang Anggaran Pendapatan Negara (APBN) atau APBD disahkan oleh DPR.

Penyerapan anggaran yang dibahas pada penelitian ini adalah kesanggupan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran secara cepat dan tepat, yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam APBD. Penentuan skala pengukuran dilakukan melalui kesepakatan daerah, dan skala pengukuran yang dipakai dalam APBD yaitu skala ordinal.

E. Regulasi Keuangan Daerah

Sistem regulasi keuangan daerah adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu (Nilawati, 2009 dalam Rasdianto dkk, 2014). Dalam penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.

Salah satu peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menimbang bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah harus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dengan landasan hukum yang jelas.

H1: Regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

F. Politik Anggaran

Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan politik. Menurut Irene S. Rubin dalam *The Politics of Public Budgeting* (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

Menurut Abdullah (2010), politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yang mana proses politik ini proses penetapan kebijakan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan elemen politik. Politik anggaran memang tak dapat dihindari, hal ini terjadi sebuah tarik menarik kepentingan pemerintah dengan legislatif secara langsung dapat mengurangi waktu dalam pengimplementasian program kerja yang sudah disepakati di awal tahun anggaran. Akibat yang ditimbulkan dari faktor politik tersebut menjadikan OPD tidak langsung dapat mengimplementasikan program kerjanya jika hal tersebut tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan dan keadilan seperti yang telah disepakati oleh legislatif.

H2: Politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

G. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Sedangkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam memperoleh barang dan jasa sesuai dengan rencana pengadaan.

Kinerja pengadaan barang selama ini tidak dinyatakan dengan jelas, hanya diukur secara finansial berupa laporan evaluasi tentang penyerapan anggaran. Sehingga tidak dapat diketahui seberapa

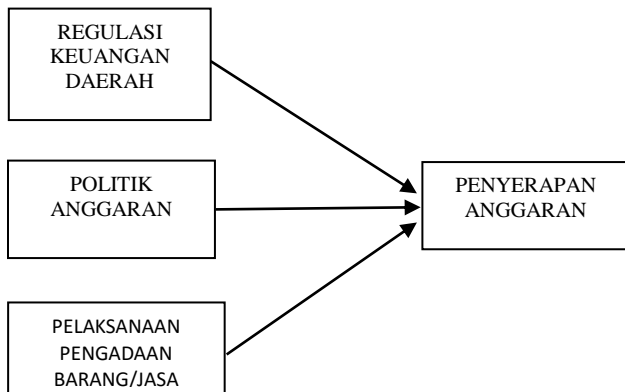
baik penyerapan anggaran dan efisiensinya yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pengadaan barang yang telah dilakukan. Sehingga permasalahan yang timbul seperti keluhan dari para pengguna anggaran yaitu ketidaksesuaian spesifikasi dan kualitas barang yang didapat, masih sering terjadi keterlambatan pengiriman, proses pelaksanaan pengadaan di lapangan yang tidak berjalan lancar/ banyak hambatan, misal terjadi lelang ulang, banyaknya sanggahan, dan ada penyedia barang yang ingkar janji (Wicaksono, dkk 2007).

H3: Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka dapat digambarkan model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif, yang merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih. Penelitian ini melihat pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

B. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 144 dari 36 OPD. Terdiri dari kepala OPD, Sekretaris OPD, Kasubag Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran pada setiap OPD Provinsi Sumatera

Barat. Sumber data populasi diperoleh dari website resmi Provinsi Sumatera Barat (<http://www.sumbarprov.go.id/>)

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian adalah data subjek, yaitu data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaan atau kuesioner dari subjek penelitian pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pimpinan dan staf sub bagian penyusunan anggaran atau penatausahaan keuangan yang terdapat di beberapa OPD Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung oleh peneliti kepada responden dan jawaban atas kuesioner yang diberikan akan ditunggu selama satu minggu.

E. Instrumen Penelitian

Kisi-kisi instrumen penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Pengukuran	Item
Penyerapan Anggaran (Y)	1. Realisasi Anggaran 2. Laporan terhadap belanja Pemda	Ordinal Likert	1) 1-3 2) 4-6
Regulasi Keuangan Daerah (X1)	1. Pemahaman pengguna anggaran 2. Mempelajari regulasi 3. Kepatuhan terhadap regulasi	Ordinal Likert	1) 1-2 2) 3-4 3) 5-6
Politik Anggaran (X2)	1. Pengalokasian anggaran, 2. Asas kebutuhan, 3. Asas keadilan.	Ordinal Likert	1) 1-2 2) 3 3) 4
Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa (X3)	1. Terlambatnya penyusunan Jadwal lelang 2. Terlambatnya penetapan pemegang Tender 3. Adanya Pengulangan lelang (Re-Tender) 4. Keterlambatan penandatanganan kontrak 5. Adanya addendum kontrak	Ordinal Likert	1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah OPD

(Organisasi Perangkat Daerah) di Sumatera Barat dengan *total sampling* dengan jumlah 36 OPD. Masing-masing OPD terdiri dari 4 responden. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 144, ada 38 kuesioner yang tidak kembali sehingga yang dapat diolah sebanyak 106. Kuesioner dibagikan pada tanggal 6 Juni 2018 dan diambil kembali pada tanggal 4 Juli 2018.

B. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Pada penelitian ini uji validitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Validitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil
Penyerapan Anggaran (Y)	0,550
Regulasi Keuangan Daerah (X ₁)	0,609
Politik Anggaran (X ₂)	0,700
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (X ₃)	0,643

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2018

Hasil uji validitas diatas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen yaitu lebih dari 0,1909. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan variabel Y, X₁, X₂, dan X₃ adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini uji validitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Penyerapan Anggaran (Y)	0,755	Reliabel
Regulasi Keuangan Daerah (X ₁)	0,797	Reliabel
Politik Anggaran (X ₂)	0,832	Reliabel
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (X ₃)	0,785	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2018

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan

semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

C. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test*.

Tabel 4. Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,98875016
Most Extreme Differences	Absolute	,108
	Positive	,108
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		1,117
Asymp. Sig. (2-tailed)		,165

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2018

Hasil uji data dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan melihat tingkat signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas dengan melihat probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,165 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5.

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Regulasi Keuangan Daerah	,261	3,835

Politik Anggaran	,263	3,805
Pelaksanaan	,877	1,140
Pengadaan Barang/Jasa		

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2018

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel coefficients dengan melihat nilai signifikansinya.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Sig.
1 (Constant)	,007
Regulasi Keuangan Daerah	,153
Politik Anggaran	,373
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	,188

Sumber : Pengolahan Data Primer 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig > 0,05, sehingga penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

D. Teknis Analisis Data

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis Deskriptif pada penelitian ini terdapat pada tabel 7.

Tabel 7. Dekriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics

	N	Min.	Maks.	Mean	Std. Deviation
Penyerapan Anggaran	106	18	30	26,03	2,471
Regulasi Keuangan Daerah	106	12	30	25,72	3,317
Politik Anggaran	106	8	20	17,04	2,593
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	106	13	25	18,76	2,880
Valid N (listwise)	106				

Sumber : Pengolahan Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 7, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel merupakan presentasi

yang baik untuk penelitian. Hal ini ditunjukkan dari standar deviasi dari setiap variabel berada dibawah rata-rata.

2. Analisis Regresi Berganda

Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda:

Tabel 8. Uji Residual

Model	Unstandardized Coefficients		Standrd Coeff.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,725	4,096		,421	,675
Regulasi Keuangan Daerah	-,014	,116	-,019	-,122	,903
Politik Anggaran	8,952	2,242	,621	3,993	,000
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	-,032	,073	-,037	-,435	,664

Sumber : Pengolahan Data Primer 2018

Hasil dari tabel di atas dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,725 - 0,014 X_1 + 8,952 X_2 - 0,032 X_3 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstan sebesar 1,725 ini mengidentifikasi bahwa jika variabel independen yaitu regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah 0 maka nilai penyerapan anggaran adalah sebesar nilai konstanta 1,725
- Koefisien regulasi keuangan daerah sebesar -0,014 ini mengidentifikasi setiap kenaikan regulasi keuangan daerah sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan penyerapan anggaran sebesar -0,014 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan negatif antara regulasi keuangan daerah dengan penyerapan anggaran. Semakin tinggi regulasi keuangan daerah, semakin rendah penyerapan anggaran
- Koefisien politik anggaran sebesar 8,952 ini mengidentifikasi setiap kenaikan politik anggaran sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan penyerapan anggaran sebesar 8,952 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara politik anggaran dengan penyerapan

anggaran.

- d) Koefisien pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebesar -0,032 ini mengidentifikasi setiap kenaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan penyerapan anggaran sebesar -0,032 dengan asumsi variabel lain konstan Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan negatif antara pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan penyerapan anggaran.

3. Uji Kelayakan Model

1) Uji Koefisien Determinasi R²

Untuk mengetahui seberapa besar penyerapan anggaran mempengaruhi regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,593 ^a	,352	,333	2,018

Sumber : Pengolahan Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 9 di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,333. Hal ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel regulasi keuangan daerah, politik anggaran, pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran adalah sebesar 33,3%, sedangkan 66,7% lainnya ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

2) Uji F

Hasil pengujian statistik F untuk melihat pengaruh secara simultan regulasi keuangan daerah, politik anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	225,627	3	75,209	18,472	,000 ^b

Residual	415,288	102	4,071		
Total	640,915	105			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Sumber : Pengolahan Data Primer 2018

Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F = 18,472$ dan signifikan pada level 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $18,472 > 2,69$ (sig. 0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3) Uji t-test

Uji t statistik (*t-test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} adalah **Error! Reference source not found.** 0,05 dengan derajat bebas (db) = $n - k = 106 - 3 = 103$ adalah 1,983, berdasarkan hasil analisis pada tabel 8. Maka dapat diketahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut.

1. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau nilai sig < 0,05. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1,983, untuk variabel regulasi keuangan daerah (X1) nilai t_{hitung} adalah -0,122 dengan nilai sig adalah 0,903. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ yaitu $-0,122 > -1,983$ atau nilai signifikan $0,903 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai negatif yaitu -0,014. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak dapat membuktikan regulasi keuangan daerah (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian hipotesis peertama (H1) **ditolak**.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} .

Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1,983, untuk variabel politik anggaran (X2) nilai t_{hitung} adalah 3,993 dengan nilai sig 0,000. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,993 > 1,983$ atau nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X2 bernilai positif yaitu 8,952. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini dapat membuktikan politik anggaran (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) **diterima**.

3. Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1,983, untuk variabel pelaksanaan pengadaan barang/jasa (X3) nilai t_{hitung} adalah -0,435 dengan nilai sig adalah 0,664. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ yaitu $-0,435 > -1,983$ atau nilai signifikan $0,664 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai negatif yaitu -0,032. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak dapat membuktikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) **ditolak**.

4. Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa variabel regulasi keuangan daerah, politik anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Tetapi secara parsial hanya politik anggaran saja yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel distribusi frekuensi variabel maupun dari pengolahan data menggunakan SPSS 21.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi keuangan daerah dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Politik Anggaran dalam pengujian hipotesis berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai Adjusted R^2 yang rendah hanya sebesar 33,3 % menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi penyerapan anggaran.
2. Penelitian ini hanya meneliti pada OPD Provinsi Sumatera Barat, sehingga untuk pemerintah provinsi lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi organisasi, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran Provinsi Sumatera Barat, meningkatkan regulasi keuangan daerah, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam sebuah OPD.
2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel lain yang diidentifikasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena rendahnya nilai Adjusted R^2 yang dihasilkan dalam penelitian ini. Variabel lain, seperti: sumber daya manusia, komitmen organisasi, faktor administrasi dan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukri dan Nazri, Ramadhaniatun.

2010. Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. *Tesis* (Tidak Dipublikasikan) Universitas Syiah Kuala.
- Adi Priatno, Prasetyo. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *E-Journal Universitas Brawijaya*, Web link: <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/603/546>, (diakses 22 Februari 2018)
- Anfujatin. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Arif, Emkhad. 2011. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, *Tesis* (Tidak Dipublikasikan) Universitas Riau.
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review.
- Deddy Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta.
- Dwi Kuncoro, Egiastyo. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. Kalimantan Timur: Fakultas Administrasi Bisnis. Universitas Mulawarman.
- Dwi Kuswoyo, Iwan. 2011. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. *Tesis* (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Erliana dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Penerbit Brama Ardian
- Gagola, Lady S., Sondakh, Jullie J., dan Warongan, Jessy D.L. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Universitas Sam Ratulangi.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonomitrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A. dan S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Handayani, Cut Huri. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2015 dengan SiLPA sebagai Variabel Moderating. *Jurnal SNA*. Universitas Sumatera Utara.
- Herryanto, Hendris 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta, *Tesis* (Tidak Dipublikasikan), Jakarta, FEUI.
- Jawa Pos. 2017. <https://www.jawapos.com/read/2017/08/28/153777/serapan-anggaran-di-bawah-10-pemprov-sumbar-di-warning-kemenkeu>. Diakses 22 Desember 2017.

- Juliani, Dian. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Universitas Gadjah Mada.
- Kaharuddin. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa”, Studi kasus belanja DAK bidang Pendidikan, *Tesis (tidak dipublikasikan)*, Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Martowardojo, Agus. 2011. Penyerapan Belanja Modal Menurun. *Harian Suara Karya*. Selasa, 20 Mei 2018.
- Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. *Tesis*. Jakarta: UI.
- Muchsin, M. dan Sofan, Andi Noor. 2011. Fenomena Penyerapan Anggaran: Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun. Yogyakarta. *Paris Review Jurnal BPKP*.
- Nasional Republika. 2017. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/22/ov364t370-serapan-anggran-sumbar-masih-lambat>. Diakses 22 Desember 2017.
- Ngurah Anom, I.G. 2015. Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Advokasi*. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Noviwijaya, A., dan Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang D). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 3, Hlm 1.
- Nugroho, M. A., dan Ananda, C.F. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun Di KPPN Malang. *Jurnal. FE dan Bisnis Universitas Brawijaya*. (online) (<http://JIM.FEB.UB.ac.id>). Diakses 25 Mei 2018.
- Priagung, Dimas Estu. 2016. Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara). *Tesis (tidak dipublikasikan)*. Universitas Jendral Soedirman.
- Purtanto. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa (Studi atas Persepsi pada Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasadi Pemerintah Kota Tegal). *Masters thesis*, Universitas Sebelas Maret. Web Link: <https://eprints.uns.ac.id/19541/> (diakses 22 Februari 2018).
- Putri, Carlin Tasya. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satker perangkat daerah di Pemprov Bengkulu. *E-journal Universitas Bengkulu*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*. Jakarta
- _____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*. Jakarta.

- _____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-daerah*. Jakarta.
- Rubin, Irene S. 1997. *The politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. New York : Chathan House Publishers.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Setiawan, Ady. 2014. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro. Tesis (Tidak Dipublikasikan) Universitas Airlangga.
- Ulum, Ihyaul. 2009. "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia". Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Diunduh dari: http://eprints.undip.ac.id/17721/1/Ihyaul_Ulum.pdf, Diakses pada tanggal 17 Desember 2017.
- Wibisono, Tri. 2012. "Tantangan antara Pertumbuhan dan Value For Money". *Warta Pengawasan*, Maret 2012. Diakses 15 Februari 2018.
- Yunarto, Imam. 2011. Memahami Proses Penganggaran untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran. Yogyakarta. *Paris Review Jurnal BPKP*. *Paris Review Jurnal BPKP*

